



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3255-3263

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Peran Pemerintah Dan Akademisi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Provinsi Papua Pegunungan

Lazarus Suyatno Vianney^{1✉}

Universitas Baliem Papua

Email: salysuyatno@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan akademisi terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Intervensi atau peran Pemerintah daerah khususnya dalam bentuk bantuan modal, terbukti memberikan dampak positif nyata bagi kemajuan UMKM. Kemudian peran dari Akademisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Akademisi, UMKM, Provinsi Papua Pegunungan*

Abstract

This research aims to determine the role of government and academics in the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Papua Mountains Province. This study uses a descriptive approach with a quantitative method with a data collection technique, namely distributing questionnaires. The results of this study conclude that the role of the regional government of Papua Mountains Province has a significant influence on the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). Intervention or the role of the regional government, especially in the form of capital assistance, has been proven to have a real positive impact on the progress of MSMEs. Then the role of academics has a significant influence on the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs).

Keywords: Role of Government, Academics, MSMEs, Papua Mountains Province

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional harus mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan komponen utama dalam pembangunan, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional ialah terciptanya pembangunan dari segi ekonomi. Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat dimaknai sebagai suatu proses yang menimbulkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka waktu yang panjang (Menajang dalam Pratama 2022). Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, perlu dilaksanakan kegiatan yang bersifat strategis yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan UMKM ini merupakan bukan suatu usaha yang baru dalam sejarah bangsa Indonesia, karena kegiatan UMKM ini memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi.

Di Indonesia perdebatan berkaitan dengan masalah konsep perekonomian rakyat masih terus berlanjut. Kebanyakan pihak mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan pembangunan kedepannya yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Oleh karena itu untuk mencapai aspek serta hasil pembangunan, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus menduduki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik yang dilihat dari aspek kuantitas maupun dari segi kemampuan dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian rakyat yang diselenggarakan oleh rakyat merupakan suatu usaha ekonomi

yang dapat menjadi sumber penghasilan atau pendapatan keluarga atau orang-orangan. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, berarti bahwa perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka secara mandiri (Ismail Aufa. 2023). UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memajukan bisnis mereka, seperti sumber daya keuangan yang tidak mencukupi untuk ekspansi bisnis, akses yang kurang memadai terhadap informasi dan bahan baku, serta jangkauan pasar yang terbatas. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang masih berada dibawah standard an rendahnya kapasitas untuk menghasilkan produk baru yang inovatif.

Kegiatan UMKM diyakini sebagai kegiatan yang memiliki peran penting bagi masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi karena dapat mengimbangi pemulihan ekonomi masyarakat. Dalam skala nasional, UMKM memainkan peran yang sangat strategis dalam memajukan perekonomian nasional. Peran strategis dari UMKM ini tidak hanya sebagai penyedia lapangan pekerjaan tetapi juga dapat memberikan peningkatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian, banyak pegiat UMKM yang memiliki kekuatan untuk tetap mempertahankan usahanya.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukannya usaha Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan kreatifitas serta inovasi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Sumadi, 2021). Pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakatnya dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dalam wujud sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan kegiatan wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki satu orang maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nalini, 2021). Adanya sektor UMKM dapat menciptakan berbagai manfaat bagi daerah diantaranya seperti dapat menghadirkan wirausaha-wirausaha yang baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang pastinya hal tersebut pasti akan menyerap tenaga kerja (Karimah et al.,2021)

Perkembangan UMKM yang kompetitif perlu mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang kondusif demi terjaminnya pengembangan UMKM. Keberadaan UMKM harus tetap dipertahankan

dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat pedesaan, bahwa usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja, pengangguran, jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi daerah (Ismail Aufa, 2023). Kemudian dari sisi akademisi menyatakan bahwa pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia yang berjiwa *inovator* dan *technopreneur* harus didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia agar bisa memberikan iklim yang kondusif (Marlinah dalam Yusnita and Wibawa 2020).

Provinsi Papua Pegunungan adalah salah satu provinsi otonom baru yang dibentuk pada tahun 2022. Provinsi ini terletak dibagian tengah pulau Papua, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. Wilayah Papua Pegunungan terdiri dari 8 kabupaten. Perekonomian di provinsi ini sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, meskipun potensi di sektor pertambangan juga ada. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Koperasi (Pridagkop) Provinsi Papua Pegunungan, jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.337, sementara pada tahun 2023 jumlahnya turun menjadi 1.994 pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sebanyak 343 UMKM atau sekitar 14,7% dalam setahun. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, termasuk tingginya inflasi serta kondisi sektor keamanan yang kurang stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Endang Sulastri, dikutip dalam Yusnita and Wibawa (2020) menyatakan bahwa mengenai peran pemerintah dan akademisi dalam memajukan Industri Kreatif (Kasus pada UMKM Kerajinan Sulaman di Kota Pariaman) menemukan bahwa peran pemerintah selama ini banyak dilakukan untuk pengrajin dan pengusaha, tetapi keinginan dari pengrajin dan pengusaha yang sangat sulit mengubah diri mereka sendiri menjadi kendala pemerintah dalam meningkatkan kualitas usaha. Sedangkan, akademisi berperan dalam berbagai kegiatan, seperti melakukan pembinaan administrasi dan keuangan usaha, mentransfer Teknologi Tepat Guna (TTG) pada UKM, serta memberikan motivasi dan semangat kepada para wirausahawan agar mampu mengembangkan usaha yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh (Trisila et al. 2019) menghasilkan bahwa Politeknik adalah perguruan tinggi vokasi yang keilmuannya aplikatif menjadi harapan baru bagi para pelaku UMKM untuk bisa membantu permasalahan yang dialami dalam menghadapi persaingan dan perkembangan usaha ditengah ketidakpastian. Peran Politeknik membantu dari sisi manajemen, akuntansi, hubungan dengan perbankan, *marketing*, jaringan dan solusi praktis maka dampaknya para pelaku UMKM mampu mengikuti perkembangan globalisasi

dan bersaing dengan perusahaan global. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Daulay (2018), menyatakan bahwa perkembangan ekonomi kreatif untuk subsektor kerajinan berada di posisi ketiga setelah kuliner dan fashion. Pola interaksi antara ketiga aktor (pelaku bisnis, pemerintah dan akademisi) harus berkolaborasi secara simbiosis mutualisme dalam merancang dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan strategi yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif adalah strategi agresif dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini adalah metode *probability sampling (simple random sampling)* dengan teknik memilih secara acak, artinya tidak memerhatikan status dalam populasi penelitian. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode statistik deskriptif itu merupakan teknik mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa adanya maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum maupun generalisasi (Sugiyono,2014). Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam analisis deskriptif, pada penelitian ini peneliti memberikan nilai setiap jawaban responden. Item sangat setuju (Skor 4), Setuju (Skor 3), Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (Skor 1). Pada variabel Peran Pemerintah (X1) terdapat 4 butir pertanyaan, variabel Peran Akademisi (X2) 4 butir pertanyaan dan pada variabel Pengembangan UMKM (Y) terdapat 8 butir pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji T (Parsial)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized		
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	20.629	1.146		18.002	.000
	Pem_X1	.148	.073	.274	2.031	.049
	Akd_X2	.329	.098	.454	3.360	.002

a. Dependent Variable: UMKM_Y

Peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM

Untuk memperkuat peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam perekonomian Indonesia, sangat dibutuhkan partisipasi aktif Pemerintah Daerah. Hal ini harus dilakukan mengingat pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia yang inklusif

serta fungsinya dalam meningkatkan produksi dalam negeri, yang kemudian berkontribusi pada stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat (Fakhrurozi 2023).

Berdasarkan tabel 1: hasil uji T di atas maka diperoleh hasil analisis untuk variabel peran pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai signifikansi 0,049 lebih kecil dari 0,05 ($0,049 < 0,05$). Maka dari nilai signifikansi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM di Provinsi Papua Pegunungan. Dengan hasil ini memberikan kepercayaan atau bukti bahwa intervensi pemerintah memiliki dampak positif yang nyata terhadap pengembangan UMKM. Hasil ini juga dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk lebih meningkatkan peran dan dukungannya terhadap UMKM. Kebijakan yang lebih terarah dan program yang lebih intensif bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja di sektor UMKM. Program yang lebih terarah dimaksud misalnya dengan memberikan bantuan modal, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 11 yang menyatakan bahwa pembiayaan oleh pemerintah Pemerintah, Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank agar dapat mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Berdasarkan undang-undang UMKM tersebut diwajibkan kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan permodalan kepada para pelaku UMKM, baik dalam bentuk pemberian dana hibah, pinjaman modal dan lain-lain. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada pegiat UMKM tentang hal bantuan dana dalam mengembangkan usahanya, para pelaku dominan sangat setuju agar pemerintah memberikan bantuan berupa dana.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pattimahu, Lewaherilla, and Pentury 2023) yang menyatakan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Kairatu dengan membuat kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan mendukung semua pemangku kepentingan dalam sektor UMKM. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan memfasilitasi dalam pengembangan usaha kecil. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Rochmadi and Rohmah 2019) yang menyatakan bahwa atas kontribusi dan peran UMKM yang sangat penting, maka pemerintah terkhusus pemerintah daerah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan agar perannya sebagai pilar membangun ekonomi bangsa dapat berjalan secara optimal. Pemerintah menjadi unsur *triple helix* yang harus memainkan peran penting atau lebih dalam mengembangkan UMKM, sebab kekuatan pemerintah akan

mampu mendorong dan bersinergi secara baik dengan unsur-unsur yang mendukung pengembangan UMKM (Pattimahu and Pentury 2023).

Peran akademisi terhadap pengembangan UMKM

Perguruan Tinggi sebagai suatu pusat pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas dan terampil akan tetapi harus mampu mengembangkan ide-ide dan bisnis baru (inovasi). Perguruan Tinggi harus mampu memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam mendukung kegiatan UMKM (Darwish 2014).

Berdasarkan tabel 1 diatas maka di peroleh hasil analisis untuk variabel peran akademisi terhadap pengembangan UMKM di provinsi papua pegunungan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Dengan nilai signifikansi ini maka dapat dinyatakan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Dari nilai signifikansi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara peran akademisi terhadap pengembangan UMKM provinis papua pegunungan. Dengan hasil ini dapat memberikan bukti bahwa peran yang dilakukan oleh pihak akademisi terhadap pengembangan UMKM berdampak positif. Hal ini juga dapat mendorong peningkatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha dalam penerapan pengembangan produk dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku UMKM. Hal ini juga memberi sinyal bagi pihak pemerintah, perguruan tinggi dan pihak terkait bahwa peran akademisi dalam mengembangkan UMKM sangat penting dan harus didorong lebih lanjut. Hal yang perlu dilakukan misalnya dengan melakukan penelitian, pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan et al. 2021) yang menyatakan bahwa pihak akademisi turut andil dalam proses pengembangan UMKM melalui kegiatan tridharma yang dilakukannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan bisnis UMKM melalui lembaga konsultan yang didirikan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Murniati 2019) menyatakan bahwa akademisi memegang peran kunci untuk memberikan kontribusi transfer ilmu pengetahuannya, hasil-hasil penelitiannya yang mengandung penggunaan teknologi baru, inovasi dan kreativitas. Lebih jauh pihak akademisi perlu memberikan edukasi dan pendampingan berkelanjutan untuk pengembangan industri kreatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Intervensi atau peran Pemerintah daerah khususnya dalam bentuk bantuan modal, terbukti memberikan dampak positif nyata bagi kemajuan UMKM. Dengan hasil ini mempertegas betapa pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor UMKM provinsi papua pegunungan melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.

Hasil analisis dengan nilai signifikansi yang ada menunjukkan bahwa peran akademisi terhadap pengembangan UMKM sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa peran dan kontribusi pihak akademisi melalui penelitian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara langsung berdampak positif terhadap kemajuan UMKM. Oleh karena itu, kolaborasi lebih lanjut antara dunia pendidikan dan dunia usaha sangat penting untuk mendorong inovasi dan peningkatan pengembangan UMKM dan harus di dukung penuh oleh pihak pemerintah dan perguruan tinggi.

SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini mayoritas pelaku UMKM provinsi papua pegunungan menginginkan adanya bantuan dana dari pihak pemerintah dan oleh karena itu disarankan kepada pemerintah untuk menyediakan lebih banyak opsi pembiayaan baik dalam bentuk dana hibah, pinjaman dengan bunga rendah maupun kemudahan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan yang mendukung pengembangan UMKM.

Perguruan tinggi perlu memperkuat kemitraan dengan UMKM melalui program-program yang lebih terarah seperti dilakukannya penelitian terapan, pelatihan keterampilan dan pendampingan pengembangan bisnis. Kolaborasi ini sangat mendukung atau membantu UMKM dalam mengakses pengetahuan baru dan inovasi yang tentunya dapat meningkatkan daya saing bagi pelaku UMKM. Terlebih khusus dalam penelitian, akademisi diharapkan perlu terlibat langsung dalam penelitian yang berdampak pada pengembangan UMKM.

Pemerintah daerah provinsi papua pegunungan perlu mendorong dan memfasilitasi kolaborasi antara akademisi dan UMKM, seperti memberikan insentif untuk penelitian yang relevan dan pendanaan untuk program pelatihan atau pendampingan. Pemerintah daerah provinsi papua pegunungan juga diharapkan mampu menyediakan *platform* yang mempermudah pelaku UMKM untuk dapat mengakses hasil penelitian yang mendukung bagi pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwish, Saad. 2014. "The Role of Universities in Developing Small and Medium Enterprises (SMEs): Future Challenges for Bahrain." *International Business and Management* 8(2): 70–77. www.cscanada.netwww.cscanada.org.
- Daulay, Zul Asfi Arroyhan (2018). 2018. "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Kota Medan)." *Jurnal manajemen dan bisnis Islam* 1 No. 2.
- Fakhrurozi, Moh. 2023. "Peranan Pemerintah Dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan UMKM Ecoprint Yasmin Wiwid Lampung." *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 7(3): 1676–86.
- Gunawan, Arie Indra, Rafiati Kania, and Widi Senalasar. 2021. "Analisis Peluang Bisnis Start-Up Konsultan UMKM Dari Akademisi Dan Institusi Pendidikan Vokasi." *Bhakti Persada* 7(1): 11–16.
- Ismail Aufa., et al. (2023). 2023. "Peran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Pemulihan UMKM Pasca Pandemi Covid-19." 2: 30–44.
- Murniati, Dewi Eka. 2009. "Peran Pendidikan Kejuruan Dalam Pengembangan Industri Kreatif." *Seminar Nasional "Peran Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan Industri Kreatif"* (November): 1–6.
- Pattimahu, Terezia Valency, Novalien Carolina Lewaherilla, and Gerrit Mathias Pentury. 2023. "Model Pengembangan UMKM Berbasis Triple Helix: Tendensi Peran Akademisi Perguruan Tinggi." *Journal on Education* 06(01): 3143–52.
- Pratama, & Monica. 2022. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM." 13(2): 137–43.
- Rochmadi, Imsak, and Siti Rohmah. 2019. "Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)." *Riset Ekonomi Pembangunan* 4(2): 161–73. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Trisila, Politeknik et al. 2019. "Peran Politeknik Mengembangkan Umkm Dalam." 8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. 2008. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008." (1).
- Yusnita, Maya, and Prihardini Wibawa. 2020. "Menakar Peran Pemerintah Dan Akademisi Terhadap Pengembangan UMKM." 5(1): 60–70.